KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Momentum Perlindungan Buruh
Tanggal : Sabtu, 02 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 13

Momentum Perlindungan Buruh



KOMPAS/ADITYA YOGA PARAMADWYA

Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Acara peringatan ini dihadiri ribuan buruh dari sejumlah organisasi di Jakarta dan sekitarnya.



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ribuan buruh bersama mahasiswa dan beberapa lembaga nonpemerintah menikmati lagu-lagu dari kelompok musik Efek Rumah Kaca saat aksi Peringatan Hari Buruh Internasional di depan Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia menghadapi persoalan serius, di antaranya, terjadinya stagnasi penciptaan lapangan kerja formal.

JAKARTA, KOMPAS — Hari Buruh Internasional (May Day) diperingati massa buruh di sejumlah kota, Jumat (1/5/2026). Hari Buruh menjadi momentum bagi buruh untuk menyuarakan perlindungan.

Di Jakarta, massa buruh antara lain berkumpul di Monumen Nasional (Monas) dan di depan Kompleks DPR, Senayan. Ada juga massa buruh yang menggelar aksi di Jalan MH Thamrin.

Di Monas, peringatan Hari Buruh dipadati buruh dari sejumlah daerah. Massa mengenakan kaus bertuliskan May Day dan membawa bendera serikat buruh masing-masing.

Seperti tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas. Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 08.40 WIB dengan mengendarai mobil MV3 Garuda Limousin.

Sebelum memberikan sambutan, Presiden terlebih dahulu mendengarkan aspirasi dari lima pimpinan serikat buruh/pekerja, yakni Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dan Ketua Umum KSPSI Mohammad Jumhur Hidayat.

Aspirasi yang disampaikan, antara lain, terkait kepastian kontrak, pengupahan, alih daya, dan percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan. Ada pula yang meminta pembangunan fasilitas perumahan, rumah sakit, *daycare* untuk buruh di kawasan industri.

Presiden tampak mencatat poin-poin tuntutan yang disampaikan. Beberapa poin aspirasi itu selanjutnya dijawab langsung Presiden saat berpidato. Presiden juga mengumumkan tiga kebijakan baru momentum Hari Buruh.

Pertama, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh (Satgas PHK). Ide pembentukan Satgas PHK adalah janjinya saat menghadiri May Day 2025.

Kedua, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO 188 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Ratifikasi Konvensi ILO 188 juga janji Presiden saat May Day 2025. Konvensi ILO 188 adalah instrumen hukum internasional yang menjadi fondasi utama dalam melindungi awak kapal perikanan di seluruh dunia.

Ketiga, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Substansi utama dalam perpres ini adalah pemberian jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kesehatan, serta skema pembagian pendapatan yang lebih adil, yakni sekitar 92 persen untuk pengemudi.

"Pengemudi ojek daring atau ojol kerja keras setiap hari, tetapi masih dibebani potongan hingga 20 persen oleh aplikator. Saya tidak setuju. Harus ditekan di bawah 10 persen," kata Presiden.

Di luar pengumuman tiga peraturan itu, Presiden menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum segera menuntaskan pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar dapat disahkan pada 2026. Presiden menekankan agar substansi RUU itu harus berpihak kepada pekerja.

Selain di Monas, massa buruh yang berasal dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berkumpul di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan. Mereka, antara lain, menuntut dilibatkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perwakilan mereka ditemui oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua dari Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa, dan sejumlah anggota DPR di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam audiensi ini, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentukan undang-undang terkait ketenagakerjaan. Dia meminta pembahasan ini melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh.

Dasco menyatakan, DPR bersama pemerintah sepakat untuk membentuk UU terkait ketenagakerjaan paling lambat akhir 2026. Dasco juga melihat terbukanya peluang untuk revisi UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, dia meminta masukan untuk memperbaiki produk hukum ini.

Berbagai daerah

Hari Buruh juga diperingati buruh di beberapa daerah. Di Kota Bandung, massa buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate. Mereka, antara lain, mengeluhkan soal tingginya angka PHK, terutama di Karawang dan Bekasi. Mereka berharap ada kolaborasi strategis antara pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja agar PHK tidak terus meningkat.

Di Kota Semarang, massa buruh berunjuk rasa di antaranya di Jalan Pahlawan. Mereka mengangkat isu, antara lain, upah layak dan jaminan kesejahteraan. Sementara itu, di Kota Yogyakarta, massa buruh berkumpul di depan Gedung DPRD DIY. Unjuk rasa, antara lain, diikuti para pekerja informal yang terdiri dari pekerja rumah tangga, buruh gendong, pekerja rumahan, dan purnamigran. Mereka berharap pekerja informal bisa tercakup dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan.

Dihubungi secara terpisah, Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin berpendapat, Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan struktural ketenagakerjaan yang serius, antara lain, stagnasi penciptaan lapangan kerja formal yang bahkan cenderung turun sehingga berpotensi menjadi bom waktu jika tidak dimitigasi secara serius.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini berada dalam posisi "lampu kuning". Sebab, masih ada ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan kapasitas penyerapan tenaga kerja.

(SYA/MED/NCA/RTG/NIK/FLO/ENG/XTI)